

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika
- Erni Widhayanti. 1988. *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.R Otje Salman, S. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973*, (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumadi Pudjosewojo. 1983. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: PT. Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*. Bandung: CV. Manda Maju.
- Masruhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.

- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Philipus M. Hudjon, dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Wiyono. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sonny Keraf. 1988. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Ula.
- W. Riawan Tjandra. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

C. LAIN-LAIN

Ardito Ramadhan, "*Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia*", <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>(diakses pada tanggal 2 September 2021, pukul 13.28)

Tri Jata Ayu Pramesti, "*Hukuman Tambahan Bagi Koruptor yang Tidak Membayar Uang Pengganti*", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54bf044fdb1c0/hukuman-tambahan-bagi-koruptor-yang-tidak-membayar-uang-pengganti>(diakses pada tanggal 2 September 2021, pukul 14.01)

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Skripsi%20fix%20mulai%20halaman%20sampul%20sampai%20daftar%20pustaka.pdf>, diakses pada Tanggal 27 Juli 2021, Jam 23.08.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-surabaya/kategori/korupsi-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> , diakses pada hari kamis tanggal 18 November 2021, pukul 15.00

Nur Syarifah, "*Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*", https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/#_ftnref30 (diakses pada tanggal 7 Januari 2022, pukul 09.00)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-surabaya/kategori/korupsi-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> , diakses pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022, pukul 09.00

Poenale Sanctie, https://id.wikipedia.org/wiki/Poenale_sanctie, diakses pada Hari Senin, Tanggal 6 Desember 2018, pukul 18.41

Ahmad Zaenal Fanani, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah), <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjaminkeadilan.html>, Diakses pada tanggal 23 Desember 2021

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-surabaya/kategori/korupsi-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> , (diakses pada hari Senin 7 Februari 2022, pukul 11.30)

kutipan pada jurnal karya Sherly Septia Suyedi dan Yenni Idrus, “Hambatan-hambatan dalam belajar yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah dasar desain jurusan IKK FPP UNP”, *Gorga Jurnal Seni Rupa*. Vol, 8 No,1 (2019). 124.

karya tulis ilmiah mahasiswa uin-suska, http://repository.uin-suska.ac.id/12147/7/7.%20BAB%20II_201803ADN.pdf , (diakses pada tanggal 23 April 2022, pukul 23:43)

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-surabaya/kategori/korupsi-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> , (diakses pada hari Senin 7 Februari 2022, pukul 11.30)

Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, “Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* II, no. 2 (2013)